

PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Annisa Nur Faidah^{1*}, Memi Pratiwi AM²

^{1,2} Komputersasi Akuntansi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Handayani Makassar
E-mail: annisa.nurfaidah@gmail.com¹ memi@handayani.ac.id²

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel

Received: 21/07/2023

Revised: 22/08/2023

Accepted: 01/09/2023

Keywords: Performance Based Budgeting; Clarity of Budget Objectives; Performance Accountability of Government Agencies

Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja; Kejelasan Sasaran Anggaran; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of performance-based budgeting and clarity of budget targets on accountability of government agencies. This type of research is descriptive research with a quantitative approach. The population of this study was ASN (Civil Servants) in the DPRD Secretariat of South Sulawesi Province with a total of 70 respondents. The data used is primary data. Data collection is done by distributing questionnaires. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that budget-based performance and budget goal clarity have a significant positive effect on the performance accountability of government agencies.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas instansi pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah ASN (Aparat Negeri Sipil) di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah 70 responden. Data yang digunakan merupakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

PENDAHULUAN

Penganggaran berbasis kinerja bukanlah konsep yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari konsep reformasi yang hebat tentang bagaimana memaksimalkan layanan publik melalui manajemen yang sistematis dan tidak hanya berfokus pada proses

internal organisasi. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dianggap berhasil, jika realisasi anggaran tercapai secara maksimal dan seluruh proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik di bawah tahap perencanaan anggaran,

pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran, dan evaluasi kinerja untuk menyediakan suatu proses untuk menilai kinerja. Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang ketat adalah respons fungsional untuk memenuhi target anggaran [1](Johansson dan Siverbo, 2014). Dengan demikian, akuntabilitas untuk kinerja dapat dicapai dalam praktik nyata.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 21)[2]. Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002: 21)[2] menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan.

Di Indonesia, akuntabilitas secara eksplisit diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 [3] tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Kenis (1979) [4] mengatakan terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Menurut Kenis (1979) [4], adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah sehingga aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi.

Beberapa penelitian yang menguji efek penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, termasuk penelitian yang dilakukan oleh (Haspiarti, 2012)[5], yang menemukan

bahwa perencanaan anggaran dan pelaporan anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Sedangkan implementasi anggaran dan evaluasi kinerja tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Lester, 2014) menemukan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, anggaran pelaporan, dan evaluasi kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan)

TINJAUAN PUSTAKA

A. Contingency Theory

Menurut Etzioni (1985)[6] dalam buku yang berjudul “Modern Organization” menyatakan bahwa teori kontigensi disebut juga teori kepentingan, teori lingkungan atau teori situasi. Teori Kontigensi berlandaskan pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri.

B. Anggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2002:61) [2] menyatakan bahwa “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”. Sedangkan menurut Bastian (2006:164) [7] “mengutip dari NationalCommitteon on Governmental Accounting (NCGA), yaitu rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatanyang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu

C. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:3) [8] adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

D. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suharono dan Solichin, 2006)[9]. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya (Kennis, 1979 dalam Trisnawati) [4]. Sasaran anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidakpuasan dari karyawan yang akan berdampak buruk terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Penerapan dengan berbasis kinerja dalam kegiatan rencana kinerja instansi pemerintah harus menaati unsur-unsur anggaran kinerja agar dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Unsur-unsur yang harus dipahami yaitu pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, serta pertanggungjawaban manajemen agar terlaksana sesuai tujuan pelaksanaan kinerjanya. Serta dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam organisasi sektor publik harus memenuhi beberapa aspek atau dimensi dalam akuntabilitas kinerja. Aspek atau dimensi akuntabilitas diantaranya: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Aspek-aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu anggaran berbasis kinerja.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan

demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Penelitian sebelumnya oleh Jalaluddin (2017)[10], dengan judul “Influence of the Implementation of the Performance-Based Budgeting on the Performance Accountability of the Regional Government Institutions (Study at the City Government of Banda Aceh)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi penganggaran berbasis kinerja terhadap kinerja akuntabilitas lembaga pemerintah daerah di kota Banda Aceh, baik secara simultan atau sebagian. Menggunakan metode sensus sebagai instrumen pengumpulan data, peneliti mengambil semua unit kerja kota pemerintah Banda Aceh sebagai populasi penelitian. Oleh karena itu memilih seluruh 38 unit kerja dengan 114 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan perangkat lunak SPSS sebagai alat perangkat lunak untuk pemrosesan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi berbasis kinerja penganggaran secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah institusi di kota Banda Aceh. Indonesia

Olabisi Oyewole Samson (2017)[11], dengan judul “Budget Management and Control in the Nigerian Public Sector: Empirical Investigation of Kwara State Ministry of Finance, Ilorin”. Studi ini meneliti tantangan yang diajukan dalam manajemen anggaran dan kontrol di Publik Nigeria Sektor menggunakan Kwara Kementerian Keuangan negara sebagai studi kasus. Data terutama diperoleh melalui desain kuesioner pada enam puluh empat responden melalui purposive random sampling teknik. Tes check and balance dilakukan pada instrumen yang digunakan melalui Cronbach's statistik analisis alfa dan faktor. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif (distribusi frekuensi dan persentase) untuk memberikan deskripsi responden. Studi ini memberikan jawaban untuk pertanyaan penelitian dan hipotesis yang dirumuskan dengan instrumentasi Chi-square dan Satu sampel uji t. Secara keseluruhan, hasilnya mengungkapkan bahwa, meskipun ada beberapa kekurangan termasuk penyalahgunaan aturan dan regulasi yang ditetapkan, dan persiapan anggaran tanpa mempertimbangkan estimasi yang wajar dan harga pasar saat ini, peralatan yang digunakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran adalah baik.

Muhammad Avicinna Dipayana (2017)[12], dengan judul “ The Process of Performance Based

Budgeting in Probolinggo City by Utilizing SIMRAL: A Phenomenology Study". Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan proses penganggaran berbasis kinerja dengan memanfaatkan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) dalam anggaran Kota Probolinggo. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses penganggaran berbasis kinerja di Kota Probolinggo dengan pemanfaatan SIMRAL ditafsirkan ketidaktaatan penganggaran untuk perencanaan; selain itu, SIMRAL dianggap sebagai solusi untuk ketidaktaatan tersebut. Mengacu pada gagasan semacam itu, dapat ditarik kesimpulan yang berbunyi "SIMRAL adalah solusi untuk ketidaktaatan penganggaran untuk perencanaan". Pemahaman tentang makna penganggaran berbasis kinerja dengan pemanfaatan SIMRAL tidak perlu membuat pemerintah kota Probolinggo menerapkan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan aturan.

Polikarpus Dwi Krispananripi (2005) [14], dengan judul "The influence of The Application Performance-Based Budget And The Clarity of Target Budget Against The Performance Accountability of Government Agencies (Case study on civil state apparatus BPKA Bandung)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Metode analisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah 80 aparatur sipil tentang manajemen keuangan Badan dan aset Bandung dan metode pengambilan sampel menggunakan jenuh. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan berbasis kinerja anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah pada Badan pengelola keuangan dan aset Bandung, (2) kejelasan target anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah pada manajemen keuangan lembaga dan aset Bandung.

Hipotesis

1. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur (indikator) kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program (Mardiasmo, 2009)[13]. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi

pemerintah sehingga aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat.

H1 : Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Menurut Mei Anjarwati (2012) [15] Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H2 : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat Negeri Sipil (ASN) yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 117 orang. sampel pada penelitian ini adalah 70 ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Karena jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) sedikit, maka sampel yang digunakan sampel jenuh atau sensus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer Responden dalam penelitian ini adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

A. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam penelitian ini dengan observasi yaitu salah satu bentuk penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Membagikan kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan penyusunan daftar pertanyaan yang singkat dan jelas, dan mudah dimengerti oleh pihak pegawai (sample yang dipilih). Menyiapkan okumen yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.

B. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan skala ordinal dan menggunakan instrumen kuesioner dalam pengumpulan data. Sementara dalam bagian pernyataan, responden diminta untuk memilih item yang sesuai dengan keadaannya dengan skala likert dari 1 sampai 5. Skala likert ini berisi lima tingkat jawaban mulai dari 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (kurang setuju), 4 (setuju), dan 5 (sangat setuju).

Teknik Analisis Data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dengan melakukan Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, kemudian melakukan Uji Hipotesis dan Uji Statistik T

Tabel 1
Variabel Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi.	1. Masukan 2. Keluaran 3. Hasil	Ordinal
Kejelasan Saaran Anggaran (X2)	Sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suharono dan Solichin, 2006) [9]	1. Jelas 2. Spesifik 3. Dapat diukur	Ordinal
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Mardiasmo, 2009:201)[13]	1. Akuntabilitas Kejujuran 2. Akuntabilitas Hukum 3. Akuntabilitas Proses 4. Akuntabilitas Program 5. Akuntabilitas Kebijakan	Ordinal

Sumber:Data Primer Diolah 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis Statistis Deskriptif

Untuk menggambarkan variabel-variabel penelitian yaitu anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas kinerja perusahaan maka peneliti menggunakan tabel deskriptif statistik sebagai berikut.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Dev
Anggaran Berbasis Kinerja	70	19	29	1728	24,69	2,470
Kejelasan Sasaran Anggaran	70	20	30	1694	24,20	2,117
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	70	30	44	2520	36,00	2,844
Valid N (listwise)	70					

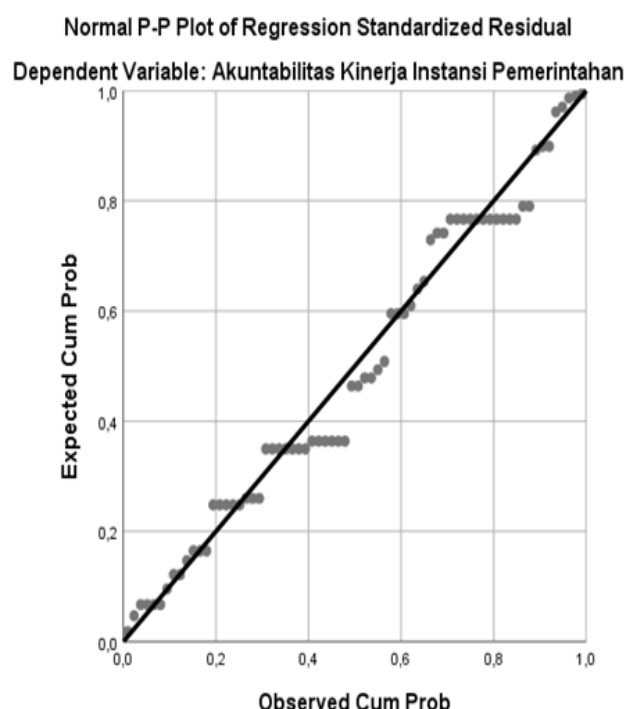
Sumber:Data Primer Diolah 2019

Tabel 2 menjelaskan bahwa pada variabel anggaran berbasis kinerja(X1) jawaban minimum responden sebesar 19 dan maksimum 29 dengan rata-rata total jawaban 24,69 dan standar deviasi 2,470. Pada variabel kejelasan sasaran anggaran(X2) jawaban minimum responden 20 dan maksimum 30 dengan rata-rata total jawaban 24,20 dan standar deviasi sebesar 2,117. Pada variabel akuntabilitas kinerja(Y) jawaban minimum responden sebesar 30 dan maksimum 44 dengan rata-rata total jawaban 25,00 dan standar deviasi sebesar 36,00.

B. Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Jika data menyebar di sekitar garis normal dan mengikuti garis diagonal, maka regresi mengikuti asumsi normalitas. Sedangkan, jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas data dilihat dengan memperhatikan pola pada kurva penyebaran probability plot. Berikut adalah hasil pengujian normalitas data.



Sumber: Data Primer, diolah 2019

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data
Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Berdasarkan gambar 1 di atas, penyebaran data berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan data dalam penelitian ini sudah terdistribusi dengan baik.

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. (Ghozali, 2016:103) [16]. Salah satu cara untuk menguji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka tidak terdapat multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai tolerance $< 0,10$ dan $VIF > 10$, maka terdapat gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut. Adapun hasil pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		

Anggaran Berbasis Kinerja	,151	6,606
Kejelasan Sasaran Anggaran	,151	6,606

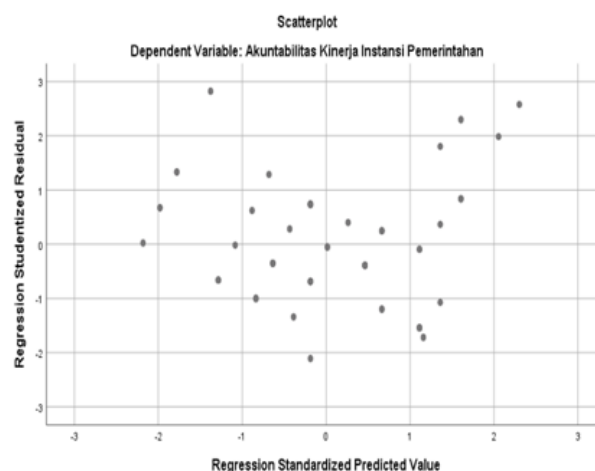
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Sumber : Data Primer Diolah 2019

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Nilai untuk masing-masing variabel independen, yaitu anggaran berbasis kinerja (X1) 0,151, kejelasan sasaran anggaran (X2) 0,151. Selanjutnya, hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini dan model regresi layak untuk dipakai.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan sebaliknya jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah apabila tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber: Data Primer, diolah 2019

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Berdasarkan gambar 2 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, serta tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan berdasarkan variabel yang mempengaruhinya yaitu, anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik linier berganda. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji variabel independen yaitu, anggaran berbasis kinerja (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2) terhadap variabel dependen yakni, akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (Y) yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	5,823	,988	
	Anggaran Berbasis Kinerja	,555	,089	,482
	Kejelasan Sasaran Anggaran	,681	,104	,507

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Y)

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Pada tabel 4 yang dilihat adalah nilai kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen. Berdasarkan persamaan umum dari regresi linier berganda, yaitu.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Maka, dapat diperoleh bentuk persamaan linier berganda sebagai berikut.

$$Y = 5,823 + 0,555X_1 + 0,681X_2 + e$$

Berdasarkan model regresi dan tabel 5. di atas, maka hasil regresi linier berganda dapat dijabarkan seperti berikut:

1. Persamaan linier berganda di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 5,823. Hal ini menyatakan bahwa jika anggaran

berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran dianggap konstan maka, akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan akan meningkat sebesar 5,823 satuan.

2. Koefisien regresi pada variabel anggaran berbasis kinerja (X1) memiliki nilai konstanta sebesar 0,555, hal ini berarti jika variabel berbasis anggaran kinerja bertambah satu satuan (1%), maka, variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan akan meningkat sebesar 0,555 atau 55,5% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.
3. Koefisien regresi pada variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) memiliki nilai konstanta sebesar 0,681, hal ini berarti jika variabel kejelasan sasaran anggaran bertambah satu satuan (1%) maka, variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan akan meningkat sebesar 0,681 atau 68,1% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Namun, apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Hasil uji t yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 5
Hasil Uji Statistik t
Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	5,823	,988		
	Anggaran Berbasis Kinerja	,555	,089	,482	,000
	Kejelasan Sasaran Anggaran	,681	,104	,507	,000

Sumber: Data Primer, diolah 2019

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa hasil uji statistik t antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis 1 (H_1): Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Anggaran berbasis kinerja signifikan dan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1) sebesar 6,238 yang

lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,030 atau t_{hitung} 6,238 > t_{tabel} 2,030 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan diterima.

2. Hasil uji hipotesis 2 (H2): Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Perusahaan. Kejelasan Sasaran Anggaran signifikan dan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} variabel komitmen organisasi (X2) sebesar 6,563 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,030 atau t_{hitung} 6,563 > t_{tabel} 2,030 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Anggaran berbasis kinerja signifikan dan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1) sebesar 6,238 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,030 atau t_{hitung} 6,238 > t_{tabel} 2,030 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan diterima.

Hasil penelitian yang menunjukan arah hubungan yang positif ini juga di dukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yaitu Komang Sri Endrayani (2014) mengatakan bahwa ketika penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan semakin baik, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Serta mengindikasikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori kontingensi yang menyatakan bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Kejelasan Sasaran Anggaran signifikan dan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} variabel komitmen organisasi (X2) sebesar 6,563 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,030 atau t_{hitung} 6,563 > t_{tabel} 2,030 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja diterima.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya menurut Angreini Pangumbalereang dan Sherly Pinatik (2014) yang mengatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, maka semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas kinerja instansi akan naik pula, akan tetapi kejelasan anggaran hanya memiliki pengaruh yang kecil saja, sedangkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini adalah Anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja telah diterapkan sehingga instansi pemerintah memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh. Dengan arah hubungan yang positif, artinya saat kejelasan sasaran anggaran dilakukan dengan baik, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pun akan semakin baik pula dan juga sebaliknya.

Saran Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperluas daerah survei atau memperbanyak jumlah responden, karena dalam penelitian ini hanya 70 responden.

Perluasan daerah survei dimaksudkan agar hasil penelitian lebih mungkin untuk disimpulkan secara menyeluruh.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data berupa wawancara dari beberapa auditor yang menjadi responden penelitian agar bisa mendapatkan data yang lebih berkualitas dan bisa keluar dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang mungkin terlalu sempit atau kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya..

UCAPAN TERIMA KASIH

Teria kasih kepada institusi universitas hasanuddin, universitas handayani yang telah mendukung penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terslesaikandengan baik tentu penelitian ini masih perlu dikembangkan dimasa yang akan datang sehingga menjadi manfaat agi semua pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah," *Accounting Analysis Journal*, 2012.
- Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta : Penerbit : Universitas Indonesia, 1985.
- E. Suhartono and M. Solichin, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi," 2006.
- Haspiarti, "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pare-Pare," Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Universitas Dipenogor, 2016.
- Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi ke-2*. Salemba Empat, 2006.
- Izzettin Kenis, "Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance," *The Accounting Review*, vol. 54, no. 4, pp. 707–721, Oct. 1979.
- Jalaluddin, "Influence of the Implementation of the Performance-Based Budgeting on the Performance Accountability of the Regional Government Institutions (Study at the City Goverment of Banda Aceh)," *Research Journal of Finance and Accounting*, vol. 8, no. 6, 2017.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Mardiasmo, "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance," *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, vol. 2, no. 1, pp. 1–17, 2006.
- Muhammad Avicinna Dipayana, "The Process of Performance Based Budgeting in Probolinggo City by Utilizing SIMRAL: A Phenomenology Study," 2017.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- O . S. OLABISI, "Budget_management_and_control_in_the_Nig," 2017.
- Peraturan Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 2004.
- P. Dwi Krispahanripi and P. Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, "The influence of The Application Performance-Based Budget And The Clarity of Target Budget Against The Performance Accountability of Government Agencies (Case study on civil state apparatus BPKA Bandung)."
- T. Johansson and S. Siverbo, "The appropriateness of tight budget control in public sector organizations facing budget turbulence," *Management Accounting Research*, vol. 25, no. 4, pp. 271–283, Dec. 2014, doi: 10.1016/J.MAR.2014.04.001.